

PERAN LURAH DALAM MENGOPTIMALISASIKAN KEGIATAN PKK DI KELURAHAN TINGKULU KECAMATAN WANEA KOTA MANADO

*Debora Meriska Punusingon¹
Sarah Sambiran²
Josef Kairupan³*

Abstrak

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia sebagai organisasi publik yang mempunyai unsur-unsur kelembagaan dari pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan. Hubungan Tim Penggerak PKK pusat dan daerah bersifat konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hirarkis, untuk mendekatkan jangkauan pemberdayaan kepada keluarga-keluarga secara langsung dibentuk kelompok-kelompok PKK RW, RT, dan kelompok dasawisma. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lurah dalam mengoptimalkan kegiatan PKK di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimaksudkan untuk dapat menjawab masalah penelitian lebih mendalam, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lurah dalam menjalankan tugas sebagai Pembina di PKK belum optimal, semangat kerja yang masih terus ditingkatkan untuk meningkatkan kegiatan PKK, sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya PKK di kelurahan, serta kurangnya dukungan dari Dewan Penyantun di Kelurahan Tingkulu PKK.

Kata Kunci: Peran, Lurah, Optimalisasi, Kegiatan, PKK.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Eksistensi gerakan PKK telah diakui secara luas sebagai gerakan dari dan oleh masyarakat, merupakan mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Gerakan yang dimotori oleh kaum perempuan ini juga terbukti mendukung secara nyata terhadap akselerasi pembangunan melalui 10 program pokok yang dilaksanakan oleh organisasi ini. Gerakan PKK sebagai gerakan dari bawah dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu juga turut berperan dalam membangun dunia pendidikan khususnya pada pendidikan Usia Dini (PAUD), Bidang Kesehatan PKK dituntut menghidupkan Posyandu dan membantu membantu ibu yang melahirkan dan akan melahirkan sehingga mengurangi angka kematian ibu dan anak saat proses persalinan, di bidang ekonomi diharapkan PKK dapat membantu usaha kecil menengah yang dilakukan kaum ibu. Hal terpenting yaitu menyiapkan kader-kader PKK di tingkat bawah serta dapat melakukan pembinaan kadernya sendiri untuk dapat menyesuaikan sumberdaya sesuai dengan tuntutan dinamika yang berkembang dewasa ini.

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis dan dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Dengan melihat tugas dan fungsi PKK tersebut tentunya sangat mendukung program-program pemberdayaan dari pemerintah. PKK yang merekrut kadernya sampai di tingkat bawah diharapkan mampu

membawa pada kondisi keluarga yang sejaterah yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia baik secara material, sosial, mental, dan spiritual serta keluarga yang berdaya yaitu keluarga yang hidup sejahtera, maju dan mandiri. Selain itu PKK diharapkan mampu membebaskan perempuan dari budaya patriarki sehingga memiliki kemandirian.

Organisasi PKK adalah organisasi publik yang mempunyai unsur-unsur kelembagaan dari pusat, Propinsi, Kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan. Hubungan Tim Penggerak PKK pusat dan daerah bersifat konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hirarkis. Dan untuk mendekatkan jangkauan pemberdayaan kepada keluarga-keluarga secara langsung dibentuk kelompok-kelompok PKK RW, RT, dan kelompok dasawisma.

Dengan melihat begitu besar peran PKK ini Menarik untuk di teliti di kelurahan Tingkulu mengenai keberadaan organisasi PKK ini yang merupakan mitra kerja dari Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing tingkatan Pemerintahan untuk terlaksananya program PKK. Sebagai mitra kerjanya Pemerintah di tingkat Kelurahan tentunya Pemerintah Kelurahan Tingkulu harus dapat bersinergi berkaitan dengan program-program yang ada dan dapat saling menopang sehingga sasaran program dapat tercapai. Tentunya menarik untuk diteliti apakah Pemerintah Kelurahan Tingkulu kecamatan Wanea. Dapat bersinergi dengan organisasi PKK ini dan saling mendukung dalam setiap

program baik program pemerintah kelurahan sendiri maupun program PKK.

Tinjauan Pustaka

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut: Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Mengenai peranan ini, Suharto (2006:32), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut: Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.

Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini

dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).

Lurah merupakan pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, seorang lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Tugas lurah adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakter wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah lurah seringkali rancu dengan kepala desa, memang pada umumnya secara historis pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah lurah. Namun konteks pemerintah Indonesia, sebuah kelurahan dipimpin oleh Lurah, sedangkan desa dipimpin oleh kepala desa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling

baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Pengertian optimalisasi menurut Poerdwadarminta (Ali, 2014) adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien". Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 pasal 1 bahwa: Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Keterkaitan perempuan dengan PKK ialah mengenai masalah bagaimana perempuan itu dapat aktif dalam untuk mencapai kesejahteraan keluarga melalui keterlibatannya di PKK sehingga eksistensi PKK di akui oleh semua pihak. Hasil kesejahteraan keluarga itu nantinya dapat dilihat dari adanya peningkatan kualitas hidup keluarga, dan adanya peningkatan ekonomi dari keluarga itu sendiri. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan didalam PKK maka diperlukan akselerasi PKK melalui reformasi PKK

sehingga dapat mengoptimalkan kesejahteraan keluarga di wilayah kerja PKK. Pembinaan kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan "10 program pokok"-nya 10 Program Pokok PKK pada hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu: Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan tatalaksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, Perencanaan Sehat

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperhensif, dan holistik (Bogdan dan Taylor 1992 dalam Wiratna Sujarweni 2014:6).

Sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab dan mengetahui Peran Lurah dalam mengusahakan mengoptimalkan kegiatan PKK untuk peningkatan kesejahteraan kaum perempuan. Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan/informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Yang diambil sebagai informan adalah orang yang

mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian, kemungkinan besar diperoleh informasi berhubungan dengan Peningkatan Kesejahteraan Kaum Wanita. Dengan jumlah informan 10 orang. Dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Lurah Tingkulu
2. Ketua PKK Kelurahan Tingkulu
3. Anggota PKK
4. Masyarakat mewakili kaum wanita

Hasil Penelitian

Untuk menopang kedudukannya sebagai pemimpin, maka Lurah haruslah memiliki wibawa baik terhadap bawahannya maupun di mata masyarakatnya. Namun bukan berarti kewibawaan harus membatasi diri terhadap masyarakat, tetapi bagaimana memberi pandangan kepada masyarakat bahwa sebagai seorang pemimpin ia harus memiliki wibawa kepada masyarakat bahwa sebagai seorang pemimpin ia harus memiliki wibawa. Adapun pengertian kewibawaan dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang memancar dalam diri seseorang karena kelebihan yang dimilikinya sehingga mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan kepadanya.

Lurah dalam mengambil sebuah kebijakan, beliau juga melihat dari berbagai aspek kehidupan dan sudut pandang sehingga keputusan yang dia ambil pun bijaksana demi terwujudnya tujuan bersama maka secara tidak langsung kewibawaan tersebut akan terpancar dalam diri seorang pemimpin tersebut.

Tidak hanya dalam mengambil keputusan kewibawaan seorang pemimpin dapat terlihat, tetapi dapat juga bagaimana seorang pemimpin dapat mengendalikan dirinya terutama

dalam mengendalikan emosinya dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi, apabila seorang pemimpin dapat melalui suatu proses dari mengendalikan diri sendiri hingga dapat mengendalikan orang lain demi terwujudnya suatu keputusan bersama maka bisa dikatakan pemimpin tersebut telah menggunakan kekuasaannya dengan baik dan dia memiliki suatu kewibawaan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap orang yang dipimpin. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat Kelurahan Tingkulu, Steven mengungkapkan:

“Saya sangat senang bekerja sama dengan Lurah, Ibu adalah sosok pemimpin yang baik dan menurut saya, bisa dikatakan berwibawa, karena dekat dengan masyarakatnya, dan mengikuti norma-norma yang ada khususnya dalam memimpin warga dan aparatnya. Beliau juga cerdas dan bijaksana dalam memimpin. Itu dapat terlihat jelas saat ia memimpin rapat, meski bisa dikatakan beliau masih muda tapi pendapat dan nasehat beliau didengarkan oleh semua masyarakat baik itu yang tua maupun pemuda”

Kekuasaan adalah kekuatan, legalitas, dan otoritas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Tanpa kekuasaan bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu menjalankan tugasnya karena hanya dengan kewenanganlah seseorang berhak memerintah orang lain.

Adanya Program Kerja yang serentak dan terpadu. Dalam menyusun program-programnya, PKK mengacu pada program Rakernas VII yang

merupakan program serentak nasional sebagai panduan dalam melaksanakan program PKK di seluruh Indonesia. Dengan adanya pedoman tersebut maka keberhasilan program akan mudah diketahui.

Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab. Dalam mengemban tugasnya, Tim Penggerak PKK merupakan SDM yang memiliki fungsi ganda yakni sebagai pegawai dan sebagai kader PKK karena kebanyakan Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan sebagian besar dari kalangan PNS. Meski memiliki peran ganda, tanggung jawab yang dimiliki sangat besar dalam membantu pemerintah dalam pembangunan.

Adanya Bantuan Dana dari Pemerintah Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung program kerja PKK yakni adanya bantuan dana dari pemerintah sebagai modal kerja.

Sebagai pemimpin masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang Lurah mengetahui kondisi atau keadaan masyarakat yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab bila pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Kabag. Umum Altje mengatakan: "Kondisi penduduk kelurahan yang beraneka ragam pada awalnya cukup menyulitkan beliau dalam menjalankan tugasnya apalagi pada saat itu kondisi penduduk masih terdapat sekat-sekat setelah pilkada tetapi dengan seiring waktu hal ini

dapat beliau atasi dengan cara selalu mengajak masyarakat kelurahan berdialog dan kepedulian yang tinggi tanpa membeda-bedakan warganya"

Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses, dan perumusan hasil.

Oleh sebab itu untuk kelancaran proses pemberdayaan masyarakat maka masyarakat selaku obyek dan subyek dari pemberdayaan masyarakat harus berpartisipasi dimana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di Kelurahan, memberi ide atau gagasan, menyumbang tenaga maupun berupa uang atau barang.

Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Tingkulu, Ibu Selvi mengatakan: "Salah satu kendala yang saya hadapi dalam program-program PKK yang membantu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Padahal pemberdayaan adalah pelaku dan tujuannya untuk masyarakat sehingga menjadi tantangan sendiri buat saya. Namun saya berusaha keras dengan mendekati diri dengan masyarakat sehingga masyarakat tertarik dan mau ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui bincang-bincang dan selalu ikut

serta dalam kegiatan masyarakat. Saya mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota. Karena kelancaran proses pemberdayaan akan berjalan jika masyarakat ikut turut aktif dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi”

Hal senada juga diungkapkan oleh Kabag. Kemasyarakatan, Marlin mengatakan: “Kurangya partisipasi masyarakat merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Lurah, hal ini karena warga Kelurahan cenderung tidak peduli dan lebih sibuk bekerja, sehingga mereka kurang tertarik dengan urusan pemerintahan khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat”. Faktor Penghambat Peran PKK Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado. Faktor penghambat pertama yang didapat oleh peneliti dalam wawancara dan pengamatan di kelurahan Tingkulu adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran PKK. Dimana sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya PKK di kelurahannya. Kemudian banyak warga masyarakat yang bersikap apatis, dan cuek terhadap kegiatan-kegiatan yang dialukan oleh kelurahan termasuk PKK. Adanya keterbatasan waktu oleh kaum perempuan di kelurahan dan pengurus PKK yang kurang aktif. Kegiatan-kegiatan PKK cenderung dilihat oleh beberapa informan memiliki kegiatan yang monoton

Semakin berkurangnya tenaga sukarela/kader PKK di Kelurahan-Kelurahan. Banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Sebagaimana keadaan di

Kelurahan, tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Tidak banyak dari mereka yang mau memikirkan sumbangsihnya untuk kemajuan pembangunan di Kelurahannya. Mereka tidak mau ribet dengan membuat laporan-laporan terlebih jika mereka belum dijelaskan terlebih dahulu dan masih asing dengan teknologi.

Terbatasnya kemampuan dan rendahnya tingkat pendidikan kader. Tingkat pendidikan seseorang kurang lebihnya sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam hal ini kader di kelurahan berbeda dengan kader di kecamatan, kader di kelurahan sebagian besar hanya ibu rumah tangga yang dalam kesehariannya membantu suami mencari nafkah. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan PKK khususnya bidang administrasi, karena salah satu kunci keberhasilan adalah melalui kegiatan tertib administrasi, termasuk pencatatan, data yang akurat dan pelaporan berjenjang, sehingga menjadi pola dasar kebijakan dalam penyusunan program kegiatan yang tepat guna dan tepat sasaran.

Minimnya tingkat pengetahuan dan keterampilan anggota PKK merupakan salah satu indikator yang menghambat peran Ketua PKK dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Tingkulu Kabupaten Tingkulu. Berikut hasil wawancara penulis mengenai faktor-faktor penghambat ketua PKK dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan wawancara diatas, maka salah satu hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan adalah minimnya anggaran dana yang diperoleh dalam melakukan

kegiatan PKK. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam hal mensejahterakan masyarakat. Dengan keterbatasan anggaran dana ini membuat dari 10 program PKK hanya beberapa program saja yang dapat berjalan.

Keterbatasan anggaran dana dan kurangnya tingkat pengetahuan dan keterampilan TP PKK dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Tingkulu merupakan faktor yang menghambat peran ketua PKK dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan perempuan. Adanya Pergantian lurah dan kepala lingkungan sehingga menghambat program PKK. Tidak ada kaderisasi kepengurusan. Kelompok PKK memerlukan kaderisasi kepengurusan sehingga kegiatan kelompok PKK bisa berjalan, tapi nyatanya ada di beberapa lingkungan sampai sekarang belum diketahui atau ketetapan pengurus karena ketidaksiapan dari masing-masing pribadi. Ada 4 kelompok PKK di lingkungan 1,3,4, dan 5 yang masih aktif dimana, kelompok PKK yang masih aktif karena susunan kepengurusan tidak dirubah, kelompok PKK tersebut ingin bertemu satu sama lain lewat kegiatan PKK. Sejauh ini yang dilakukan lurah sehingga kelompok PKK lingkungan 1,3,4, dan 5 masih aktif adalah Lurah selalu memberi motivasi kepada pengurus kelompok PKK.

Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah Kelurahan membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan,

dimana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor Kelurahan dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan Kelurahan dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh ketersedianya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam rapat Kelurahan dan kegiatan penyuluhan pertanian akan berjalan lancar jika tersedianya tempat beserta peralatan tulis menulis misalnya papan tulis (black board), LCD, dan Laptop yang digunakan dalam rapat dan penyuluhan. Contohnya saja saat melakukan penyuluhan kesehatan masyarakat, masyarakat tidak begitu paham dengan apa yang disampaikan oleh penyuluh karena hanya berupa penjelasan saja tanpa menggunakan papan tulis dan LCD sehingga masyarakat tidak begitu paham dan tertarik dalam mengikuti penyuluhan. Hal ini juga berdampak pada program pemberdayaan masyarakat yang lain.

Kesimpulan

1. Peran Lurah dalam menjalankan tugas sebagai Pembina di PKK belum optimal, semangat kerja yang masih terus ditingkatkan untuk meningkatkan kegiatan PKK
2. PKK belum optimal dalam membuat tujuan dan fungsi kegiatan PKK bagi kaum wanita
3. Hal-hal yang menghambat peran PKK antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran PKK. Dimana sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya PKK di kelurahannya, Kurangnya dukungan dari Dewan Penyantun di Kelurahan-Kelurahan

Dewan penyantun TP PKK adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK dalam hal ini dewan penyantun di Kelurahan adalah Lurah. Dewan Penyantun bisa saja menjadi faktor penghambat manakala program yang dijalankan tidak mendapat dukungan dari Lurah. Di Kecamatan Wenang adanya Dewan Penyantun banyak yang turut mendukung berbagai program PKK, namun juga terdapat Dewan Penyantun dalam hal ini Lurah yang tidak mendukung program-program PKK.

Saran

1. Agar kedepanya Lurah sebagai pimpinan lebih mengoptimalkan kegiatan PKK sehingga kegiatan PKK dikelurahan Tingkulu berjalan sebagai mana mestinya.
2. Dibutuhkan adanya kesiapan dari pada setiap kaum wanita untuk ikut serta dalam kegiatan PKK
3. Pihak kelurahan khususnya kepala lingkungan harus lebih proaktif dalam mengupayakan kader-kader PKK untuk ikut serta berpartisipasi dalam kepengurusan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hendaknya Lurah dan PKK secara umum dan pihak pemerintah kelurahan secara khusus untuk lebih meningkatkan kegiatan PKK.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, B. A. Sacbani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Ali, M. A. 2014. *Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada Kaltimgps.Com*

- di Samarinda, *Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- Anitasari, Dini S, Mellly Setyawati, Sri Wahyuni. 2010. *Kebijakan pemberdayaan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat, 2008. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Levinso dan Soekanto. 2009:213. *Peranan*, Edisi Baru Rajawali Pers. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007.
- Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, S. 2009:212-213. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, E. 2006. *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sujarweni, W. V. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PB Pustaka BaruPers.
- Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.